

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KALIMANTAN
TIMUR PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL
(Kajian Pada Aspek Sumber Daya Alam dan
Sumber Daya Manusia)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

BAMBANG SUHARTO

155020104111002



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KALIMANTAN TIMUR PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL (Kajian Pada Aspek Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia)

Yang disusun oleh :

Nama : Bambang Suharto
NIM : 155020104111002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Mei 2018.

Malang, 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Susilo, S.E., M.S.

NIP 196010301986011001

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KALIMANTAN TIMUR PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL (Kajian Pada Aspek Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia)

Bambang Suharto, Susilo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
email: masbambangsoharto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya alam, desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan angkatan kerja terhadap kemiskinan. Obyek penelitian adalah 9 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur pada tahun 2011-2015, sedangkan analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dimana menghasilkan model yang terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu sumber daya alam, desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan angkatan kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan daerah.

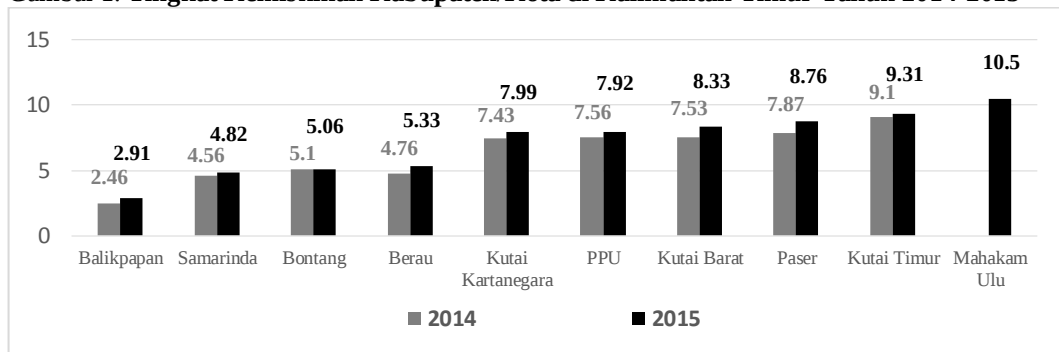
Kata kunci: Sumber Daya Alam, Desentralisasi Fiskal, Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, Kemiskinan

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang telah diterapkan di Indonesia sejak 2001. Selain diterapkan dalam hubungan politik pusat dan daerah dengan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang (UU) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi juga diterapkan dalam kebijakan fiskal dengan lahirnya UU 34/2000 tentang Perubahan Atas UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu unsur Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang mana dalam pembagiannya lebih mengutamakan daerah penghasil (*by origin*) telah memberikan keuntungan (*privilege*) bagi daerah yang kaya SDA, termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Kekayaan alam khususnya dari komoditas pertambangan dan penggalian telah menjadikan kesepuluh kabupaten/kota di Kaltim termasuk dalam 15 besar penerima DBH SDA terbesar pada tahun anggaran 2016. Hasil pembangunan yang semakin baik kini dirasakan masyarakat yakni angka kemiskinan yang lebih rendah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dari nasional.

Namun demikian, Kalimantan Timur juga memiliki masalah yang terkait dengan kekayaan SDA-nya. Penurunan harga batubara kisaran tahun 2011-2016 berdampak pada perekonomian Kaltim, laju pertumbuhan provinsi Kalimantan Timur terus merosot dari 6,47 di tahun 2011 menjadi minus 1,21 di tahun 2016. Selain itu, pada level kabupaten/kota terdapat ketimpangan dimana angka kemiskinan sangat bervariasi antar daerah, bahkan salah satu kabupaten yaitu Mahakam Ulu ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Pertumbuhan yang merosot juga diikuti kemiskinan yang meningkat di hampir seluruh daerah pada tahun 2015 (Gambar 1).

Gambar 1: Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2014-2015

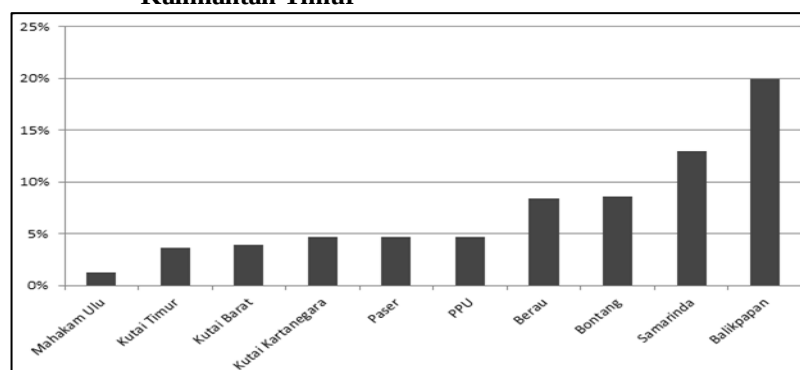


Sumber: Data diolah BPS, 2018

Berdasarkan fakta di atas, ada tidaknya pengaruh kekayaan sumber daya alam terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur menarik untuk diteliti. Namun demikian, Meier dan Baldwin (dalam Jhingan, 2016:43) berpendapat bahwa pengembangan sumber daya pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Keterbelakangan manusia dan sumber daya alam dianggap memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Dari aspek SDA, sektor pertambangan dan penggalian menjadi *leading sector* pada mayoritas daerah di Kaltim dan memiliki *share* yang tinggi terhadap PDRB mereka. Padahal, pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi faktor penting bagi kemiskinan. Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin semakin berangsur-angsur berkurang (Tambunan, 2015:107). Di sisi lain, terdapat hipotesis Kutukan SDA (*natural resource curse*) yang didasari fenomena bahwa keberlimpahan SDA justru seringkali tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain berperan penting perekonomian, pada era desentralisasi sekarang ini besarnya DBH SDA juga berkontribusi penting terhadap keuangan daerah. Sayangnya, hal ini telah menyebabkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sulit berkembang. Sebagaimana Gambar 2, rasio PAD terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota pada umumnya masih kecil bahkan di bawah 5%. Padahal, eksistensi PAD dalam APBD merupakan wujud kemandirian daerah yang akan berperan penting dalam mencapai tujuan desentralisasi fiskal. Menurut Mahmudi (2010), “semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”. Dengan demikian desentralisasi fiskal dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

Gambar 2: Rasio PAD terhadap Belanja Daerah tahun 2015 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur



Sumber: Data diolah DJPK Kemenkeu, 2018

Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pengaruhnya terhadap kemiskinan dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Terkait dengan kualitas atau mutu SDM, mekanisme pengaruhnya terhadap kemiskinan tak lepas dari nisbah ekonomi yang lebih tinggi biasanya

didapat oleh individu-individu yang memiliki keunggulan dalam ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dsb. Treichel (2005) dalam Suselo et al (2008) juga menjelaskan “*return to labor*” sangat ditentukan oleh *physical assets*, *human capital*, dan *social capital*, yang jika faktor-faktor tersebut rendah maka seorang pekerja dapat terjebak dalam kemiskinan”. Maka pembangunan manusia menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kemiskinan.

Sementara dari segi kuantitas, angkatan kerja (*labour force*) dapat mewakili kuantitas SDM karena menggambarkan seberapa banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Penduduk yang menjadi angkatan kerja dan mampu memperoleh pekerjaan diharapkan akan memperoleh penghasilan (*income*) yang tentunya berguna bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Besarnya investasi yang masuk ke Kalimantan Timur sangat memungkinkan penduduk yang menjadi angkatan kerja dapat terserap atau dengan kata lain memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, semakin banyak angkatan kerja di suatu daerah memungkinkan semakin sedikit pula kemiskinan di daerah tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan serta memperhatikan belum adanya penelitian yang terkait pengaruh keempat faktor secara bersamaan terhadap kemiskinan, maka penulis memilih judul: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kalimantan Timur Pada Era Desentralisasi Fiskal”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam telah lama dipandang sebagai salah satu modal pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, penggunaan SDA dalam pembangunan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain deplisi, kelangkaan, dan konservasi (Sutikno & Maryunani, 2006). Selain itu, penggunaan SDA juga seringkali menimbulkan keterpurukan ekonomi yang dikenal dengan Kutukan Sumber Daya Alam (*natural resource curse*). Menurut Tim Article 33 & Haryanto (2017), kutukan sumber daya alam terjadi ketika suatu negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA), ternyata justru memiliki kesejahteraan masyarakat yang buruk. Menurut Feryawan (2011), efek berbahaya dari kutukan menurutnya dapat meningkat karena meningkatnya ketergantungan dari hasil atas sumber daya alam”.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2006), “pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah”. Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin semakin berangsur-angsur berkurang (Tambunan, 2015:107). Ahluwalia (1976) dalam Suselo, et al (2008) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang disertai dengan meningkatnya *inequality*, namun di sisi lain pendapatan penduduk miskin juga meningkat meskipun dengan *rate* yang lebih lambat dari rata-rata peningkatan pendapatan.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menurut Khusaini (2006) didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal diwujudkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi yang mana menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta adanya Dana Perimbangan. Bagi daerah khususnya yang kaya SDA, peningkatan PAD diperlukan: (1) untuk meningkatkan diskresi pemerintah daerah agar mampu melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan daerah termasuk penanggulangan kemiskinan, (2) mencegah ancaman defisit keuangan yang disebabkan berkurangnya nilai DBH SDA di masa depan. Dalam mengukur derajat desentralisasi, menurut

Haryanto (2017) terdapat dua cara: (1) menghitung kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, dan (2) menghitung kontribusi PAD terhadap total belanja.

Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran yang tepat akan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena merangkum tiga komponen yaitu masa hidup (*longevity*), pengetahuan, serta standar hidup (Todaro, 2011:57). Todaro (2011:307) menekankan bahwa diperlukan serangkaian kebijakan yang ditujukan secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin dan komunitas mereka melalui program-program untuk membangun kapasitas serta modal manusia dan sosial kaum miskin, diantaranya pendidikan, kesehatan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat berdampak meningkatnya produktivitas sehingga membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Angkatan Kerja

Dalam konsep kemiskinan absolut, orang miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan. Maka, upaya utama bagi orang miskin untuk menanggalkan status miskinnya adalah dengan meningkatkan pendapatan mereka. Rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah akan cenderung mengerahkan anggota keluarganya untuk bekerja. Dengan menjadi angkatan kerja, diharapkan penghasilan keluarga akan meningkat sehingga dapat mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Mengenai angkatan kerja yang tersedia di suatu daerah, terdapat ukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk pada usia kerja (BPS, 2018). Maka, TPAK menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Latumaerissa, 2015: 73).

Kemiskinan

Penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. (Latumaerissa, 2015:101). Dalam mengukur kemiskinan di suatu daerah, BPS menggunakan tiga indeks, yaitu: (1) *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan, (2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. (3) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan mengecualikan Kabupaten Mahakam Ulu disebabkan sedikitnya data yang tersedia, sedangkan kurun waktu yang diteliti adalah dari tahun 2011 s.d. 2015. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang menggunakan alat bantu perangkat lunak statistik yaitu Eviews versi 8. Sesuai prosedur regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan uji pemilihan model terbaik yaitu memilih antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, setelah melakukan estimasi dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, normalitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan kemiskinan yang diukur menggunakan *Head Count Index* (HCI-P0) yakni rasio penduduk miskin dengan jumlah penduduk, sedangkan variabel independen terdiri dari: (1) variabel sumber daya alam, diwakili *share* atau kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan satuan persen, (2) variabel desentralisasi fiskal yang diwakili rasio antara PAD dengan Belanja Daerah dengan satuan persen, (3) variabel pembangunan manusia yang diwakili nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tanpa satuan, serta (4) variabel angkatan kerja yang diwakili Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

dengan satuan persen. Jenis data penelitian adalah data sekunder yang sumbernya diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Berikut adalah model regresi dalam penelitian ini:

$$Kemiskinan_{it} = \alpha + \beta_1 SDA_{it} + \beta_2 DF_{it} + \beta_3 PM_{it} + \beta_4 AK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

α	=	Konstanta
$\beta(1...4)$	=	Koefisien regresi masing-masing variabel independen
N	=	Banyaknya wilayah observasi (9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur)
T	=	Jangka waktu penelitian (2011-2015)
ε	=	Variabel pengganggu
Kemiskinan	=	Persentase kemiskinan (persen)
SDA	=	PDRB sektor pertambangan dan penggalian (rupiah)
DF	=	Rasio PAD dengan total belanja daerah (persen)
PM	=	Indeks Pembangunan Manusia (tanpa satuan)
AK	=	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil *Uji Chow* dan *Uji Hausman* didapatkan model terbaik untuk regresi data panel dengan data yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Hasil regresi yang telah lulus uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 : Hasil Estimasi Regresi Data Panel Metode *Fixed Effect Model*

Variabel independen	Variabel dependen: Kemiskinan (Y)		
	Coefficient	Prob (t-stat)	Keterangan
Konstanta	28,583	0,0003	Signifikan ($\alpha = 5\%$)
Sumber Daya Alam (X1)	-4,866	0,0060	Signifikan ($\alpha = 5\%$)
Derajat Desentralisasi Fiskal (X2)	-4,833	0,0541	Signifikan ($\alpha = 10\%$)
IPM (X3)	-0,228	0,0083	Signifikan ($\alpha = 5\%$)
TPAK (X4)	-0,045	0,0399	Signifikan ($\alpha = 5\%$)
R-squared = 0.983961			
Prob (F-statistic) = 0.000000			

Sumber: hasil olah data EVIEWS 8, 2018

Dari hasil regresi diatas dapat diperoleh persamaan yang menunjukkan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen (Sumber Daya Alam, Derajat Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) terhadap Kemiskinan di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

$$Kemiskinan_{it} = 28,583 - 4,866 SDA_{it} - 4,833 DF - 0,228 PM_{it} - 0,045 AK_{it}$$

Interpretasi koefisien dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 28,583. Apabila diasumsikan SDA, desentralisasi fiskal, IPM, dan TPAK adalah konstan, kemiskinan di kabupaten/kota di Kalimantan Timur adalah 28,58%.
- Koefisien variabel sumber daya alam (SDA) yang di-proxy dengan *share* PDRB sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB adalah sebesar -4,866. Artinya, apabila

- terdapat kenaikan *share* PDRB sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 1%, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4,866% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap;
2. Koefisien variabel derajat desentralisasi fiskal (*DF*) yang di-*proxy* dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah adalah sebesar -4,833. Artinya, apabila terdapat peningkatan PAD/Belanja Daerah sebesar 1%, maka kemiskinan turun sebesar 4,833% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap;
 3. Koefisien variabel pembangunan manusia (*PM*) yang menggunakan *proxy* Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebesar -0,228. Apabila terdapat peningkatan IPM sebesar 1 poin, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,228% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap;
 4. Koefisien variabel TPAK (*AK*) adalah sebesar -0,045. Apabila terdapat peningkatan dari TPAK sebesar 1%, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,045% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Pembahasan

Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Kemiskinan

Sumber Daya Alam (SDA) yang diwakili dengan kontribusi atau *share* Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur berdasarkan hasil estimasi penelitian ini. Artinya, semakin tinggi kekayaan SDA semakin berkurang angka kemiskinan. Sebagai sektor yang menjadi penopang perekonomian di Kalimantan Timur, sektor ini memberi kontribusi yang paling signifikan pada PDRB Kalimantan Timur dengan rata-rata 52,80% pada periode 2011 s.d. 2015. Begitupun bagi Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, dalam lima tahun tersebut sektor ini selalu menjadi *leading sector* dalam PDRB pada 6 dari 9 daerah yang diteliti. Selain itu, dari 17 sektor ekonomi, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan yang memiliki nilai *location quotient* (LQ) lebih besar dari satu atau merupakan sektor basis (BPS, 2015). Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu diantaranya Azis, dkk (2016), Hutabarat (2015), Saputra (2011), dan Widiastuti (2010).

Meskipun sektor pertambangan pada umumnya memiliki karakteristik usaha yang padat modal, padat teknologi, serta berisiko tinggi, ternyata masih diminati oleh investor. Perusahaan-perusahaan tambang yang memperoleh ijin eksplorasi pertambangan dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian. Manfaat yang langsung contohnya adalah melalui penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, serta menghasilkan bahan mentah yang digunakan oleh industri-industri pengolahan. Di sisi lain, perusahaan tambang juga memberi manfaat tidak langsung, diantaranya meliputi sirkulasi barang dan jasa, pembangunan infrastruktur dan munculnya unit-unit usaha pendukung seperti usaha yang memasok kebutuhan pangan, sandang, dan pangan karyawan. Maka, aktivitas perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan dan penggalian kemudian memberikan *multiplier effect* terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian, meskipun di satu sisi sektor pertambangan dan penggalian hanya menyerap sebesar 9,51% tenaga kerja (tahun 2015), sektor ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di sektor-sektor lain yang tumbuh berkat kehadiran aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan. Sebaliknya, penurunan aktivitas pertambangan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015, menyebabkan lesu bahkan berhentinya sektor-sektor penunjang yang kemudian menyebabkan peningkatan kemiskinan daerah. Selain itu, adanya program bantuan maupun *Corporate Social Responsibilities* (CSR) dari perusahaan-perusahaan kepada masyarakat setempat juga meningkatkan pengaruh SDA terhadap kemiskinan.

Namun demikian, terdapat fakta menarik bahwa daerah kaya SDA seperti Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur masih memiliki kemiskinan yang lebih tinggi dari daerah lain. Kegagalan meningkatkan kualitas dan mengefektifkan kuantitas SDM merupakan penyebab ketertinggalan mereka. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh variabel SDA tidak cukup membantu menanggulangi kemiskinan apabila mengesampingkan aspek lainnya, yaitu sumber daya manusia.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan

Desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan berdasarkan hasil estimasi penelitian ini. Rasio PAD dan Belanja Daerah yang merupakan salah satu cara mengukur derajat desentralisasi fiskal menggambarkan sejauh mana suatu daerah memiliki kemandirian melaksanakan pembangunan di daerah, sebagaimana menurut Mahmudi (2010) semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sesuai hipotesis dan penelitian terdahulu diantaranya Hutabarat dan Sriyono (2015), Aulia (2014), dan Sudewi dan Wirathi (2013).

Pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan harus dilihat dari dua sisi yaitu sisi pendapatan dengan cara peningkatan PAD dan dari sisi belanja yaitu bagaimana menetapkan prioritas pembangunan dengan tepat. Dilihat dari sisi pendapatan, daerah yang memiliki porsi PAD yang tinggi terhadap Belanja memiliki kemiskinan yang rendah, yaitu Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Berau. Meskipun memiliki kesamaan dengan kelima daerah lainnya dalam hal transfer Dana Bagi Hasil yang melimpah ruah, tetapi potensi PAD yang ada pada daerah-daerah tersebut mampu dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih mandiri.

Peningkatan PAD yang terjadi di Kalimantan Timur umumnya dilakukan dengan menciptakan struktur perekonomian baru yang tidak lagi bergantung pada tambang. Pemunculan sektor unggulan baru akan diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan mampu mengatasi kemiskinan. Salah satu contohnya adalah Berau. Kabupaten ini memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dari daerah bertipe Kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan Berau memiliki diversifikasi ekonomi berupa pariwisata yang dikenal dengan Wisata Bahari Kawasan Taman Laut Derawan yang mampu mendatangkan banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tentunya hal ini akan menumbuhkan perekonomian khususnya di kawasan wisata, seperti penginapan, souvenir, jasa transportasi, dsb. Hasilnya adalah peningkatan PAD sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat. meningkatnya PAD dapat memberikan kepastian bagi daerah untuk membelanjakan anggarannya tepat waktu dan tepat jumlah. Hal ini tentu dapat mempercepat realisasi dari program-program pembangunan daerah termasuk penanggulangan kemiskinan.

Dilihat dari sisi pengeluaran, pada sebagian besar daerah di Kalimantan Timur, Belanja Modal merupakan jenis belanja daerah dengan porsi yang paling besar (tahun 2015). Hal ini membuktikan bahwa daerah-daerah di Kalimantan Timur telah memprioritaskan anggarannya untuk membangun barang-barang publik di daerah yang dapat menyejahterakan masyarakat. Belanja modal seperti pembangunan fasilitas-fasilitas publik dasar baik fasilitas kesehatan maupun pendidikan sangat dibutuhkan oleh penduduk miskin untuk keluar dari jurang kemiskinan.

Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Hasil regresi data panel membuktikan pengaruh yang signifikan dan negatif pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Maka, peningkatan pembangunan manusia yang diukur dengan IPM akan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal dan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu Suliswanto (2010) dan Saputra (2011).

Peningkatan pembangunan manusia yang menggambarkan kualitas SDM menjadi penting dalam memutus rantai kemiskinan karena melalui peningkatan standar hidup, kesehatan, dan pendidikan yang dilakukan akan berimbas pada peningkatan produktivitas dan pada gilirannya pada peningkatan pendapatan. Sebaliknya, kualitas dan produktivitas yang rendah menjadi sebab sulitnya menciptakan pendapatan karena ketidakmampuan penduduk di kelompok miskin untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Akibatnya, ketersediaan lapangan kerja maupun penyediaan akses berupa informasi lowongan kerja tidak cukup membantu pengentasan kemiskinan.

Penurunan kemiskinan yang berjalan lambat bahkan secara absolut mengalami peningkatan di Kalimantan Timur telah disadari oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari masih rendahnya

kualitas SDM. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 secara eksplisit dikatakan bahwa masalah kemiskinan di Kalimantan Timur disebabkan belum maksimal dan meratanya subsidi terhadap kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). Ketimpangan pembangunan manusia di Kalimantan Timur menjadi penyebab angka kemiskinan yang bervariasi. Kualitas SDM yang baik di Samarinda, Balikpapan, maupun Bontang ternyata berdampak pada kemiskinan yang lebih rendah daripada di daerah lainnya. Tingginya IPM di ketiga daerah tersebut salah satunya adalah banyaknya jumlah migran yang memiliki pendidikan baik. Data Statistik Migrasi Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 menunjukkan dari seluruh migran risen di Kalimantan Timur, yang berpendidikan Diploma IV/S1 dan S2/S3 masing-masing sebanyak 68% dan 66%-nya berada di tiga daerah itu. Selain itu, tingginya IPM juga disebabkan oleh adanya fasilitas layanan publik yang lebih memadai dan umumnya lebih baik. Berdasarkan data kesehatan yang dihimpun BPS, pada tahun 2015 jumlah rumah sakit dari ketiga kota tersebut mencakup 69,5% dari jumlah seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur, sedangkan jumlah tenaga dokter (umum, gigi, dan spesialis) sama dengan 60,8% dari jumlah dokter di Kalimantan Timur. Masyarakat dengan kesehatan yang lebih baik di ketiga daerah perkotaan tersebut pada akhirnya memiliki produktivitas yang lebih baik dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik pula.

Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan

Hasil regresi data panel membuktikan pengaruh yang signifikan dan negatif angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Proxy yang digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Maka, peningkatan rasio angkatan kerja pada penduduk usia kerja akan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal dan hasil penelitian sebelumnya, yaitu Siburian (2017).

Pada dasarnya angkatan kerja merupakan *supply*, sehingga pengaruhnya signifikan terhadap kemiskinan juga dibantu dengan terbukanya kesempatan kerja (*demand*) yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Sektor yang menjadi menyerap tenaga kerja paling besar di Kalimantan Timur adalah Perdagangan dan Pertanian. Kedua sektor tersebut adalah sektor padat karya dimana kualifikasi tenaga kerja yang diserap tidak harus terampil sekali (*skilled labour*). Oleh karena itu, peluang untuk mendapatkan pendapatan dari kedua sektor tersebut terbuka lebar, terutama untuk penduduk miskin yang umumnya minim keahlian. Hal ini didukung dengan fakta bahwa ditinjau dari pendidikannya, jumlah angkatan kerja dari lulusan perguruan tinggi hanya 14,29%. Artinya sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Timur masih cenderung berpendidikan rendah.

Demand yang cukup tinggi dari dua sektor di atas akhirnya juga mampu anak-anak dan kaum ibu/perempuan dari keluarga miskin. Anak-anak yang telah memasuki usia kerja karena tuntutan akan kebutuhan keluarganya akan memilih untuk segera bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan, sehingga mereka telah dihitung sebagai angkatan kerja. Demikian juga bagi kaum ibu/perempuan.

Selain itu, tingginya arus migrasi yang mempengaruhi fluktuasi angkatan kerja juga secara langsung mempengaruhi angka kemiskinan. Sebanyak 57,1% dari migran risen di Kalimantan Timur berdasarkan Statistik Migrasi 2015 memiliki kegiatan utama bekerja. Apabila mereka berada selama paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan dan bermaksud menetap di daerah tersebut, maka saat dilaksanakan survei mereka telah terhitung sebagai angkatan kerja dan sebagai penduduk. Disebabkan masih rendahnya daya saing masyarakat setempat, maka kemungkinan besar kaum migran mendapat pekerjaan yang lebih layak sehingga tidak termasuk penduduk miskin. Akibatnya, kehadiran migran akan meningkatkan penyebut dari angka kemiskinan tetapi tidak menaikkan pembilang dari angka kemiskinan dan menyebabkan angka kemiskinan yang lebih rendah. Sebaliknya, kepergian migran misalnya akibat gejolak ekonomi dapat membuat angka kemiskinan meningkat kembali. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, penurunan aktivitas pertambangan menyebabkan banyaknya kasus Putus Hubungan Kerja (PHK). Pada tahun itu pula, dua daerah tambang mengalami penurunan TPAK terbanyak, yaitu Paser (-12,4%) dan Kutai Barat (-9,1%). Kemiskinan di daerah-daerah tersebut pun ikut meningkat.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yaitu menggunakan regresi data panel, diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu sumber daya alam, desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan angkatan kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para pemerintah daerah perlu segera merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya selain sektor pertambangan dan penggalan. Tentunya yang sesuai dengan potensi daerah dan memiliki peluang mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Meskipun kekayaan alam terutama komoditas pertambangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, tetapi memiliki beberapa sisi negatif, seperti: (1) merupakan sektor *tradable* yang dapat bersaing barang dari daerah lain, (2) permintaan terbesar adalah dari pasar internasional sehingga sangat mudah terjadi fluktuasi harga, (3) bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga akan habis di kemudian hari, (4) berdaya rusak tinggi pada lingkungan.
2. Diversifikasi ekonomi di atas juga dapat bermanfaat pada peningkatan PAD sehingga sangat menguntungkan bagi keuangan daerah. Hal ini karena peningkatan porsi PAD terhadap belanja terbukti efektif untuk mengurangi kemiskinan. DBH SDA yang selama ini menjadi tulang punggung di seluruh daerah harus secara bertahap tidak lagi menjadi tumpuan. Sebagaimana diketahui nilai DBH SDA sangat tergantung pada penerimaan negara dari hasil tambang, sehingga berisiko bagi pembangunan daerah yang berkesinambungan. Selain itu, tingginya porsi belanja modal perlu diimbangi dengan belanja modal yang lebih berdampak bagi warga miskin dalam bentuk infrastruktur jalan dan jembatan di daerah-daerah pedesaan dan terpencil.
3. Peningkatan kualitas SDM perlu diwujudkan melalui penciptaan barang publik yang mendukung seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Selanjutnya, yang perlu dipikirkan adalah peningkatan akses dari keluarga miskin terhadap fasilitas-fasilitas tersebut. Kegagalan peningkatan pembangunan manusia yang selama ini terjadi di daerah kaya tambang harus segera diatasi dengan program-program yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.
4. Penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap angkatan kerja adalah upaya yang bisa dilakukan, terutama yang sesuai dengan kualitas dari *labour supply*. Namun demikian, harus ada program dan kebijakan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dari angkatan kerja yang ada, misalnya mengefektifkan peran dari Balai Latihan Kerja. Berkaitan dengan fluktuasi angkatan kerja yang disebabkan arus masuk dan keluar dari para migran, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang pro terhadap warga lokal, misalnya dengan mensyaratkan penggunaan tenaga kerja lokal pada lapangan usaha yang tidak memerlukan keahlian tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT serta berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus

kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Nely. 2014. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 3, No. 2, pp. 327-336.
- Azis, G.A., dkk. 2016. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol. 12, No. 1, pp. 29-48.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten-Kota di Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015*. Samarinda: BPS Kalimantan Timur
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2016. *Laporan Perekonomian Kalimantan Timur 2015*. Samarinda: BPS Kalimantan Timur
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2017. *Laporan Perekonomian Kalimantan Timur 2016*. Samarinda: BPS Kalimantan Timur
- Bappenas. 2016. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2015*. Jakarta: Bappenas.
- Feryawan, D. Y. 2011. *Assessing Natural Resources Curse Hypothesis at The Local Level in Indonesia*. Den Haag: International Institute of Social Studies.
- Gujarati, D. N. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. 2004. *Basic Econometrics The 4th edition*. New York: Mc Graw-Hill.
- Gujarati, D. N. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto, J. T. 2017. Comparative Analysis of Financial Performance in Fiscal Decentralization Era Among Natural and Non-Natural Resources Region. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 9, No. 2, pp. 171-184.
- Hutabarat, Estomihi. 2015. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan, Studi Kasus Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jhingan, M.L., 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Depok: PT. Rajagrafinfo Persada.
- Kementerian Keuangan RI. 2017. *Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 Audited*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Latumaerissa, J. R. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Martawardaya. Berly, dkk. 2015. *Kutukan Sumber Daya Alam di Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: Article 33 Indonesia.
- Michael P. Todaro, S. C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Provinsi Kalimantan Timur. 2014. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Saputra, W. A. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Siburian, Elida M. 2017. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Suselo, Sri Liani. 2008. Kemiskinan di Indonesia, Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, pp. 155-196.
- Sudewi, Ni Nyoman & I.G.A.P. Wirathi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Propinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 2, No. 3, pp. 135-141.
- Sukirno, S. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutikno & Maryunani. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Malang: BPFE Universitas Brawijaya.
- Tambunan, T. 2015. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim Peneliti Article 33 Indonesia, J. T. 2017. *Mengelola Kutukan, Menimbang Masa Depan*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Widiastuti, Ari. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Widyasworo, R. 2014. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Angkatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008 – 2012)*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.